



Population Economics: Mengenal *Demographic Bonus Dividend* Mengulas Transisi Demografi di Indonesia, Bonus atau Bencana?

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2024

Ringkasan

- Tahun 2035 diantisipasi menjadi tahun di mana Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi. Padahal pada kenyataannya, Indonesia saat ini sudah dan sedang memasuki era bonus demografi khususnya bonus demografi tahap pertama.
- Lalu apa itu Bonus Demografi? Bonus demografi atau *demographic dividend* adalah dampak dari perubahan struktur usia penduduk suatu bangsa, khususnya dampak secara ekonomi.
- Namun demikian, bonus demografi tidak terjadi secara otomatis apalagi cuma-cuma; terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar "bonus" dari struktur demografi tidak berubah menjadi "bencana" atau *demographic burden*.
- Terdapat 3 (tiga) mekanisme untuk dapat memanfaatkan *demographic dividend*, yaitu melalui penawaran tenaga kerja, modal manusia, dan tabungan.
- Transisi demografi di Indonesia, yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, telah mengubah struktur usia penduduk serta membawa Indonesia berada dalam fase bonus demografi tahap pertama.
- Hal ini ditunjukkan dari rasio ketergantungan yang berada di bawah 50% sejak tahun 2015, yang mengindikasikan bahwa struktur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif.
- Rasio ketergantungan di Indonesia diproyeksikan akan kembali meningkat setelah tahun 2035 dan kembali berada di atas 50% pada 2045 dikarenakan *era ageing population*.
- Pencapaian pemanfaatan *demographic dividend* di Indonesia terus mengalami perbaikan, khususnya pada aspek investasi modal manusia seperti peningkatan indeks pembangunan manusia dan angka partisipasi sekolah. Selain itu, proporsi tabungan terhadap PDB juga mengalami peningkatan.
- Namun demikian, capaian di beberapa indikator khususnya indikator ketenagakerjaan, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, rendahnya tingkat produktivitas dan pendapatan pekerja, serta rendahnya kepemilikan tabungan dan aset lansia masih menyisakan tantangan bagi Indonesia untuk dapat memetik bonus demografi seutuhnya.
- Hal ini tentunya patut menjadi prioritas pemangku kebijakan, mengingat kesempatan untuk memetik *demographic dividend* agar tidak berubah menjadi "bencana" atau *demographic burden*, khususnya pada fase *window of opportunity* yang diproyeksikan akan terjadi pada rentang tahun 2020-2035 untuk Indonesia, memiliki batasan waktu dan hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah bangsa Indonesia.

Raniah Salsabila
Asisten Bidang Kajian -
Kajian
raniahsalsaa@gmail.com

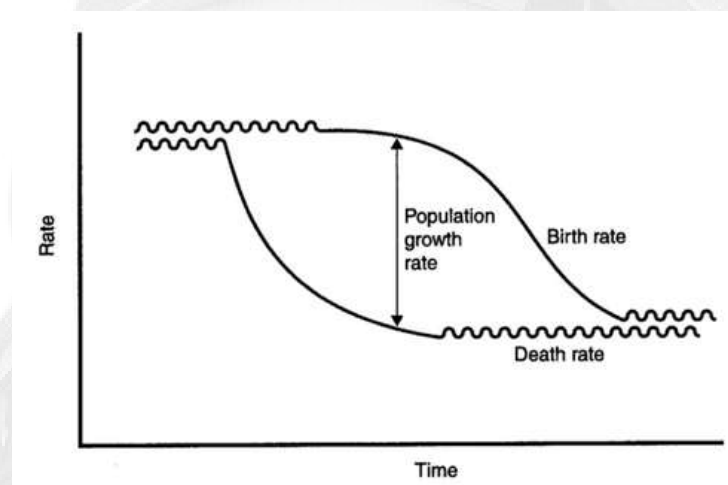
Qisha Quarina
Koordinator Bidang Kajian
Microeconomics Dashboard
qisha.quarina@ugm.ac.id



Pendahuluan

Bonus Demografi atau *Demographic Dividend* merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat diperoleh dari perubahan struktur demografi (transisi demografi) suatu negara yang dapat terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu penawaran tenaga kerja, tabungan, dan modal manusia (Bloom et al., 2003; Population Reference Bureau, 2012). Transisi demografi sendiri ditandai dengan penurunan tingkat kematian (*mortality rates*) dan tingkat kelahiran (*fertility rates*) ke tingkat yang rendah atau stabil (Bloom et al., 2003; Todaro & Smith, 2014). Bloom et al. (2003) lebih lanjut menjelaskan bahwa penurunan tingkat kematian dan kelahiran tidak terjadi secara serentak, di mana tingkat kelahiran turun beberapa waktu setelah tingkat kematian turun yang mengakibatkan lonjakan pertumbuhan penduduk (Gambar 1). Namun demikian, Bloom et al. (2003) menambahkan bahwa faktor yang lebih penting dari transisi demografi adalah perubahan struktur usia yang terjadi di dalam transisi demografi tersebut. Perubahan struktur usia dapat dilihat dari perubahan piramida penduduk dan ukuran **rasio ketergantungan** atau *dependency ratio*, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (penduduk usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Peningkatan proporsi penduduk usia produktif inilah yang berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian suatu negara melalui penambahan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi. Namun, kondisi ini tidak terjadi secara otomatis atau “cuma-cuma”, “**bonus**” dari struktur demografi dapat berubah menjadi “**bencana**” atau *demographic burden* jika negara tidak dapat memaksimalkan manfaat dari bonus demografi tersebut (Misra, 2017). Kajian Bidang Kajian *Microeconomics Dashboard* kali ini akan mengulas transisi demografi di Indonesia dan melihat apakah capaian yang ada saat ini dapat menjamin terjadinya “bonus” demografi atau justru “bencana” demografi?

Gambar 1. Transisi Demografi



Sumber: Bloom et al. (2003, pp. 31).



Secara historis, jumlah penduduk dan tren angka kelahiran yang tinggi di Indonesia salah satunya disebabkan adanya nilai budaya yang lebih menyukai ukuran keluarga yang besar. Di tahun 1971, setiap perempuan di Indonesia memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) anak. Namun, ketika program alat kontrasepsi atau program keluarga berencana (KB) mulai diperkenalkan, perempuan memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) anak. Sementara di tahun 2030 hingga 2035 diproyeksikan perempuan hanya memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) anak (Adioetomo & Pardede, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keinginan untuk mengendalikan angka kelahiran atau fertilitas. Angka fertilitas menurun jika angka mortalitas atau kematian menurun. Maka dari itu, salah satu penyebab keinginan mengendalikan angka kelahiran adalah karena orang tua mulai menyadari bahwa lebih baik memiliki anak dengan jumlah sedikit namun memiliki peluang hidup yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas anak (Adioetomo & Pardede, 2018; Bloom et al., 2003). Selain itu, ukuran keluarga yang lebih kecil juga didorong dari faktor pendidikan perempuan yang meningkat. Dalam hal ini, peningkatan pendidikan perempuan akan meningkatkan *opportunity cost* dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga waktu yang dialokasikan untuk mengurus dan membesarkan anak akan berkurang (Birdsall et al., 2001).

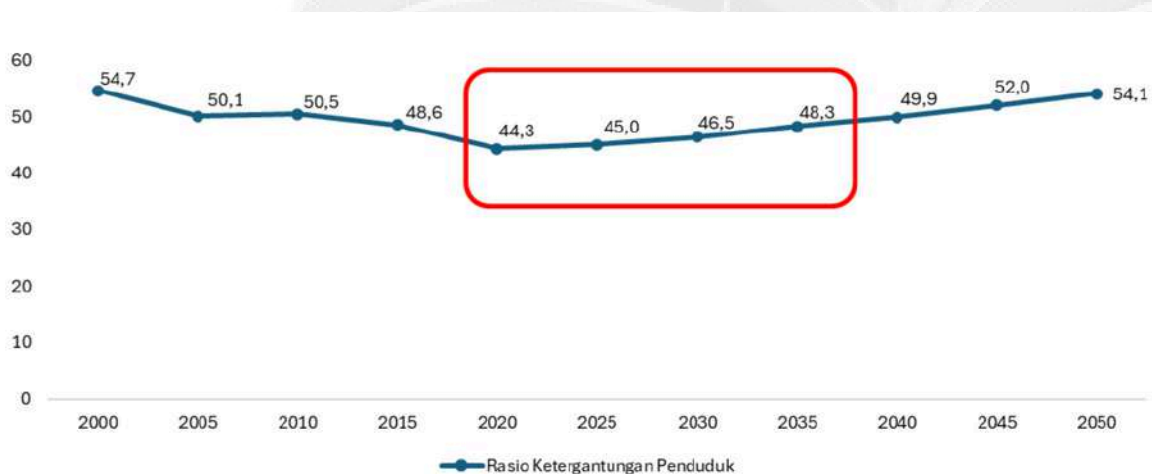
Seperti dijelaskan sebelumnya, penurunan tingkat mortalitas yang diikuti dengan penurunan tingkat fertilitas merupakan awal dari transisi demografi (Adioetomo & Pardede, 2018; Bloom et al., 2003). Transisi demografi kemudian akan memiliki dampak terhadap struktur usia suatu negara serta efek dari transisi demografi yang cepat dapat dirasakan selama beberapa generasi. Lonjakan awal pertumbuhan penduduk terjadi ketika awal penurunan tingkat mortalitas dan fertilitas. Namun, ketika tren tingkat kelahiran yang menurun dan ukuran keluarga semakin kecil atau yang disebut dengan generasi "***baby boom***" mencapai tahun reproduksi, maka akan menciptakan "***baby boom***" berikutnya dan menghasilkan "***bulge***" dalam struktur usia yang merupakan gelombang demografi atau yang disebut dengan ***hidden momentum of population*** (Bloom et al., 2003). Negara dengan populasi yang mengarah ke "***youth bulge***" memiliki rasio ketergantungan atau *dependency ratio* yang menurun sehingga kelompok usia muda memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan menjadi sebuah bonus demografi (Misra, 2017).



Di Indonesia, penurunan rasio ketergantungan atau *dependency ratio* telah terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Gambar 2 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan telah berada di bawah 50% sejak tahun 2015, artinya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sudah lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara khusus, rasio ketergantungan pada tahun 2015 adalah sebesar 48,6%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia non-produktif (penduduk usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas). Sedangkan di tahun 2050, rasio ketergantungan penduduk Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 54,13%. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri jika nantinya di tahun 2050 Indonesia memiliki hampir seperlima penduduk lansia dengan rasio ketergantungan di atas 50% (BPS, 2023d).

Fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah sebelum kembali meningkat, akibat mulai terjadinya penuaan populasi (*ageing population*), disebut dengan fase **Jendela Peluang** atau **Window of Opportunity** yang akan terbuka **hanya satu kali dalam sejarah bangsa** Indonesia. Adioetomo dan Pardede (2018) menjelaskan bahwa untuk Indonesia, diproyeksikan jendela peluang akan terjadi pada periode 2020-2035 (Adioetomo & Pardede, 2018, pp.30). Pernyataan ini didukung dari tren data rasio ketergantungan pada Gambar 2, yang menunjukkan proyeksi rasio ketergantungan akan kembali meningkat di tahun 2035 dan mencapai angka di atas 50% di tahun 2045. Peningkatan rasio ketergantungan tersebut disebabkan struktur penduduk Indonesia akan memasuki era *ageing population* seperti yang terlihat pada proyeksi piramida penduduk pada Gambar 3.

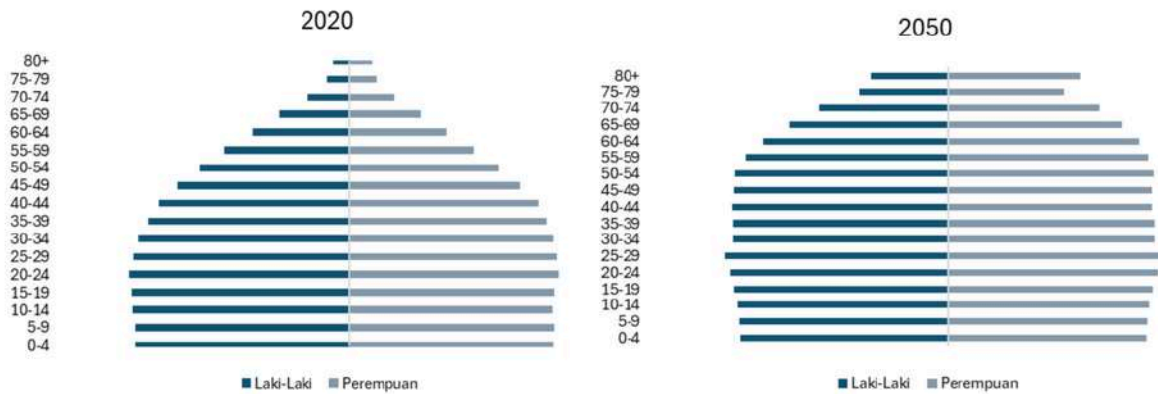
Gambar 2. Tren Rasio Ketergantungan di Indonesia (%)



Sumber: BPS 2008, 2013, 2023d (diolah penulis).



Gambar 3. Piramida Penduduk di Indonesia



Sumber: BPS 2023d (diolah penulis).

Berdasarkan proyeksi di atas, Indonesia saat ini dapat dikatakan telah memasuki era bonus demografi. Namun demikian, terdapat beberapa prasyarat untuk dapat memetik manfaat dari perubahan struktur penduduk tersebut sehingga bonus demografi (*demographic dividend*) tidak berubah menjadi bencana demografi (*demographic burden*). Untuk memahami hal ini, perlu dipahami bahwa bonus demografi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bonus demografi pertama dan bonus demografi kedua. Maka dari itu, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai model transisi demografi dan bonus demografi, kondisi capaian Indonesia dalam memanfaatkan atau “memetik” bonus demografi yang ada, serta kesimpulan apakah transisi demografi di Indonesia berpotensi menjadi “bonus” atau “bencana”.



Model Transisi Demografi

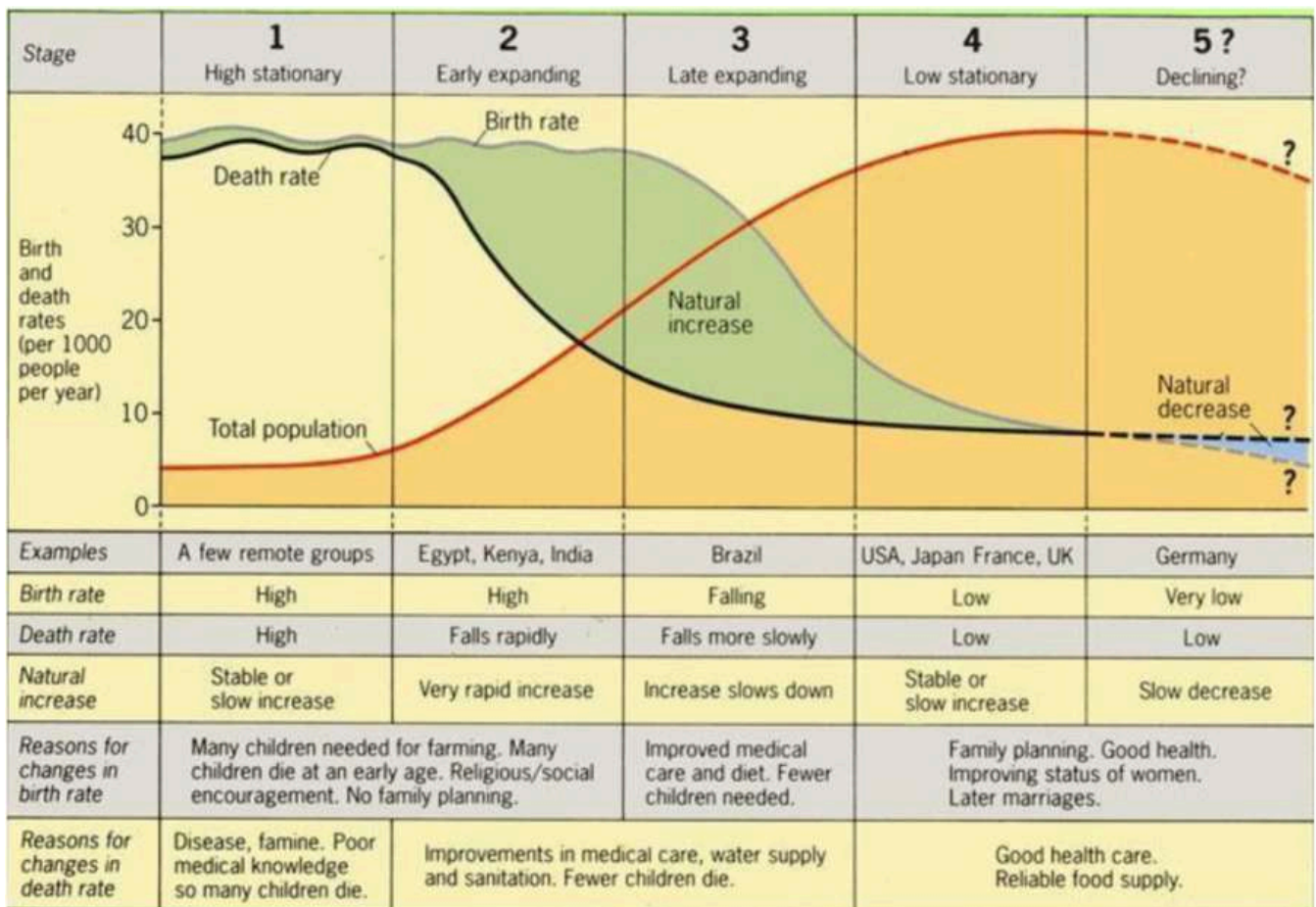
Dikutip dari Laaser dan Beluli (2015), transisi demografi yang dialami oleh suatu negara secara umum terbagi menjadi 5 (lima) tahap. Tahap pertama adalah ketika tingkat kelahiran dan kematian masih tinggi. Pada tahap ini kelaparan, penyakit, dan sarana kesehatan yang masih minim menjadi penyebab utama tingginya tingkat kematian; selain itu, belum adanya program keluarga berencana menyebabkan tingginya tingkat kelahiran, dan anak-anak merupakan sumber utama tenaga kerja di pertanian, namun minimnya kualitas fasilitas kesehatan menyebabkan banyak dari anak-anak meninggal dunia pada usia yang relatif muda. Pada tahap kedua, tingkat kematian mulai turun disebabkan perbaikan fasilitas kesehatan, sanitasi, dan ketersediaan air bersih. Selanjutnya, pada tahap ketiga penurunan tingkat kematian juga diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya *opportunity cost* dari memiliki anak untuk perempuan yang bekerja.

Pada tahap transisi demografi kedua dan ketiga ini, terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang pesat. Terkait pertumbuhan penduduk, hingga saat ini masih terdapat perdebatan apakah pertumbuhan penduduk memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Berdasarkan periode waktu dan konteks negara, pandangan mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pandangan pesimis, optimis, dan netral (Bloom et al., 2003). Pandangan pesimis mulai berkembang setelah Perang Dunia ke-2 dan didasari oleh Teori Malthus (1798) yang berpendapat bahwa dengan sumber daya yang tetap untuk memproduksi pangan dan perkembangan teknologi yang lambat, produksi pangan tidak akan mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk, sehingga akan terjadi kelaparan dan kematian. Namun pandangan pesimis ini mulai terbantahkan di awal tahun 1980-an dengan terjadinya kemajuan teknologi yang pesat dan meningkatnya peranan dari akumulasi modal manusia, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ekonom seperti Simon Kuznets (1960) dan Julian Simon (1981). Kemajuan teknologi dan peranan modal manusia untuk melakukan inovasi dalam melakukan proses produksi yang lebih efisien, interaksi sosial maupun inovasi institusi akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Bloom et al., 2003, pp. 15-16).



Pada pertengahan tahun 1980-an, pandangan netralis mulai mendominasi. Berdasarkan data-data yang ada, negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat; namun demikian, hubungan negatif ini akan melemah ketika faktor-faktor lain (seperti ukuran negara, keterbukaan perdagangan, capaian pendidikan, dan kualitas institusi) turut diperhitungkan di dalam model (Bloom et al., 2003, pp.17). Sehingga, ketika faktor-faktor lain tersebut diperhitungkan di dalam model, tidak ditemukan dampak yang signifikan, baik secara positif maupun negatif, antara pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang mendasari berkembangnya pandangan netralis.

Gambar 4. Model Transisi Demografi



Sumber: Laaser dan Beluli (2015, pp.18).



Lebih lanjut, pada tahap keempat transisi demografi, mulai terjadi stagnasi pertumbuhan penduduk, di mana tingkat kelahiran dan kematian sudah mencapai titik yang rendah dan cenderung stabil. Perbaikan sistem kesehatan dan meningkatnya usia harapan hidup (UHH) menjelaskan rendahnya tingkat kematian yang ada. Di sisi lain, program keluarga berencana dan peningkatan pendidikan perempuan mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran. Hal ini dikarenakan *opportunity cost* untuk membesarkan dan mengurus anak menjadi lebih besar ketika perempuan yang lebih berpendidikan memutuskan untuk masuk ke pasar kerja. Sehingga, akan terjadi peningkatan usia kawin pertama dan penurunan permintaan terhadap anak.

Pada tahap kelima, diproyeksikan akan terjadi penurunan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk yang negatif, yang ditandai dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah dan tingkat kematian yang juga rendah namun mulai berada di atas tingkat kelahiran. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor alami, seperti kematian akibat penuaan populasi, atau kematian akibat penyakit kronis sebagai akibat dari globalisasi, seperti serangan jantung, diabetes, hipertensi.



Bonus Demografi (*Demographic Dividend*)

Bonus demografi atau *demographic dividend* merupakan dampak dari perubahan struktur usia penduduk suatu negara, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, transisi demografi akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk. Namun, dampak dari pertumbuhan penduduk sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi masih memiliki perdebatan dengan 3 (tiga) pandangan, yaitu pesimis, optimis, dan netralis. Bloom et al. (2003) menjelaskan bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam transisi demografi adalah perubahan struktur usia penduduk yang dihasilkan dari proses transisi demografi tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan struktur usia inilah yang menjadi sumber terjadinya *demographic dividend*.

Namun demikian, bonus demografi atau *demographic dividend* bukanlah suatu hal yang terjadi secara otomatis atau cuma-cuma. Bloom et al. (2003) menjelaskan bahwa *demographic dividend* dapat terjadi melalui 3 (tiga) mekanisme, yaitu suplai tenaga kerja, modal manusia, dan tabungan. Lebih lanjut, Adioetomo dan Pardede (2018, pp. 33) berpendapat bahwa untuk dapat memetik bonus demografi, setidaknya diperlukan 4 (empat) komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, kebijakan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, dan tata kelola institusi pemerintah yang baik dan benar. Dengan kata lain, diperlukan adanya kebijakan yang tepat untuk dapat memetik manfaat dari bonus demografi. Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai bonus demografi pertama dan bonus demografi kedua.

1. Bonus Demografi: Tahap Pertama

Bonus demografi tahap pertama adalah ketika laju pertumbuhan penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk usia non-produktif (Adioetomo & Pardede, 2018; Olaniyan et al., 2012) dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Namun demikian, pertumbuhan penduduk usia produktif ini tidak serta merta akan meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia produktif tersebut. Oleh karena itu, pada tahap ini sangat diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas modal manusia penduduk usia produktif agar terjadi peningkatan produktivitas untuk memberikan dampak positif bagi pendapatan per kapita nasional maupun pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi terdahulu telah membuktikan bahwa peningkatan penduduk usia produktif mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Bloom et al., 2003; Olaniyan et al., 2012; Van Der Gaag & de Beer, 2014).



Namun demikian, bonus demografi tahap pertama ini hanya bersifat sementara atau *transitory*. Bonus demografi tahap pertama ini dapat dilihat dari indikator rasio ketergantungan yang mengalami penurunan. Berdasarkan indikator ini, rasio ketergantungan paling rendah yang disebut dengan fase Jendela Peluang atau *window of opportunity* hanya akan terjadi pada rentang beberapa tahun dan hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa (Adioetomo & Pardede, 2018). Lebih lanjut, bonus demografi tahap pertama ini merupakan prasyarat keberhasilan bonus demografi di tahap kedua. Dengan demikian, upaya untuk meraih bonus demografi tahap pertama ini memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang efisien serta efektif agar tidak kehilangan momentum yang ada.

2. Bonus Demografi: Tahap Kedua

Bonus demografi tahap kedua adalah ketika penduduk usia produktif dapat mengakumulasi aset atau tabungan ketika mereka bekerja, untuk membiayai konsumsi mereka di masa mendatang, khususnya ketika masa mereka sudah tidak lagi bekerja. Bonus demografi tahap kedua dapat dicapai jika bonus demografi tahap pertama berhasil menciptakan modal manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompeten, dan berdaya saing. Artinya, bonus demografi kedua dapat tercapai jika produktivitas pekerja meningkat serta memiliki tabungan dan aset untuk menghadapi masa lansia. Oleh sebab itu, untuk mencapai bonus demografi kedua diperlukan peningkatan investasi modal manusia sepanjang siklus hidup sebagai persiapan penggantian angkatan kerja yang akan memasuki masa lansia. Peningkatan pendidikan berkualitas dan penciptaan lapangan kerja menjadi upaya prioritas untuk meningkatkan taraf hidup manusia yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Adioetomo & Pardede, 2018; Olaniyan et al., 2012).

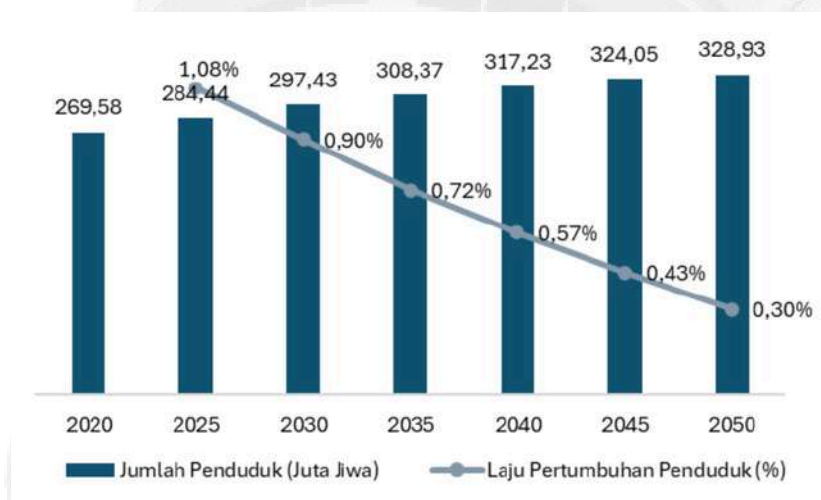


Transisi Demografi di Indonesia: Indonesia berada di tahap mana?

Di Indonesia, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus meningkat namun laju pertumbuhan penduduk akan terus mengalami perlambatan hingga tahun 2050 (Gambar 5). Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 ada sebanyak 269,58 juta jiwa, sedangkan di tahun 2050 diproyeksikan akan mencapai 328,93 juta jiwa. Akan tetapi, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1,08%, dan hanya sebesar 0,3% di tahun 2050 (BPS, 2023d). Salah satu penyebab penurunan laju pertumbuhan penduduk yaitu angka kelahiran dan kematian yang menurun, khususnya melalui program keluarga berencana dan pembangunan kesehatan (Adioetomo & Pardede, 2018).

Sementara itu, angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) pada Gambar 6 menunjukkan tren menurun kecuali di periode-periode tertentu, seperti di tahun 1964, 2004, dan 2020 tren CDR justru meningkat. Salah satu penjelasan tingginya angka kematian di Indonesia, khususnya pada tahun 1960an, adalah karena akses pelayanan kesehatan dan pengetahuan tentang perawatan kesehatan masih rendah (Adioetomo & Pardede, 2018). Selain itu, terjadinya pandemi global COVID-19 pada tahun 2020 juga menjelaskan tingginya angka kematian pada tahun tersebut. Namun secara umum, penurunan tren tingkat kematian dapat dijelaskan karena adanya perbaikan pada fasilitas kesehatan, sanitasi, dan ketersediaan air bersih.

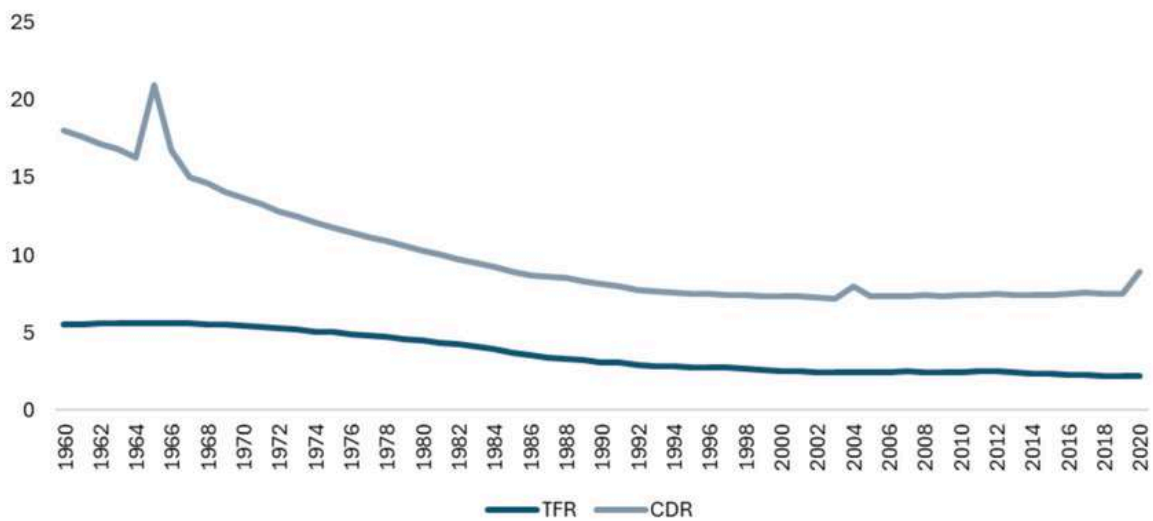
Gambar 5. Jumlah (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) di Indonesia



Sumber: BPS 2023d (diolah penulis).



Gambar 6. Tren Kelahiran Total (Per Perempuan) dan Kematian Kasar (Per 1000 Penduduk) Tahun 1960-2020



Sumber: *World Bank Open Data 2022b; 2022c* (diolah penulis).

Sedangkan dari sisi fertilitas, Indonesia secara historis merupakan negara yang memiliki tren kelahiran tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain i) nilai budaya yang lebih menyukai banyak anak sehingga memiliki ukuran keluarga besar karena dianggap dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di sektor pertanian; ii) tingkat pendidikan perempuan masih rendah sehingga partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja atau dalam sektor perekonomian modern masih sedikit; serta iii) memiliki keterbatasan akses informasi dan pelayanan dalam pengendalian kelahiran (Adioetomo & Pardede, 2018, pp. 52). Namun seiring berkembangnya jaman, angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) terus mengalami penurunan. Salah satu penjelasannya adalah karena meningkatnya *opportunity cost* memiliki anak untuk perempuan yang bekerja. Di tahun 1960 angka kelahiran total mencapai 5,54 yang artinya seorang perempuan melahirkan 5 (lima) hingga 6 (enam) anak selama masa reproduksi, sedangkan di tahun 2020 TFR hanya 2,19, yang artinya seorang perempuan melahirkan 2 (dua) hingga 3 (tiga) anak selama masa reproduksi (BPS, 2023d).



Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6, terlihat bahwa Indonesia saat ini berada di antara akhir tahap ketiga dan memasuki tahap keempat dari model transisi demografi yang dijelaskan pada Gambar 4. Kondisi ini ditunjukkan dengan mulai terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan penduduk, walaupun secara jumlah masih akan terus meningkat hingga 2050. Selain itu, tingkat kematian dan kelahiran juga telah memasuki tingkat yang rendah dan relatif stabil. Hal ini mengindikasikan pula bahwa Indonesia akan segera memasuki era transisi demografi menuju *ageing population*, dan akan segera mengakhiri masa emas untuk dapat memetik bonus demografi.

Lebih lanjut, perubahan tren angka kelahiran yang selalu menurun dapat mengurangi proporsi populasi penduduk usia muda. Sementara itu, penurunan angka kematian dapat meningkatkan proporsi penduduk usia produktif dan lansia (Rostiana & Rodesbi, 2020). Kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur usia penduduk. Gambar 7 menunjukkan komposisi usia penduduk di atas 65 tahun pada tahun 2020 hanya sekitar 6,15%, namun di tahun 2050 diproyeksikan meningkat drastis yaitu sekitar 16,03%. Artinya, hampir seperlima penduduk di Indonesia adalah penduduk lansia (berusia di atas 65 tahun). Sebaliknya, penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan akan mengalami penurunan di tahun 2050 (BPS, 2023d). Perubahan komposisi usia penduduk tersebut dapat berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh sebab itu, investasi terhadap tumbuh kembang anak secara berkualitas untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia (Adioetomo & Pardede, 2018, pp. 27).

Selain itu, Indonesia saat ini sedang memasuki periode bonus demografi tahap pertama. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk anak-anak berusia kurang dari 15 tahun terus menurun, sedangkan proporsi penduduk usia kerja meningkat namun proporsi penduduk lansia melambat (lihat Gambar 7). Jika dilihat secara makro, bonus demografi terjadi ketika penduduk usia kerja dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cara jumlah anak yang dilahirkan lebih sedikit namun berkualitas, serta meningkatkan pendidikan bagi perempuan sehingga perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, diperlukan investasi modal manusia yang berkualitas agar dapat mencapai bonus demografi karena bonus demografi tidak dapat terjadi secara otomatis atau cuma-cuma (Adioetomo & Pardede, 2018).

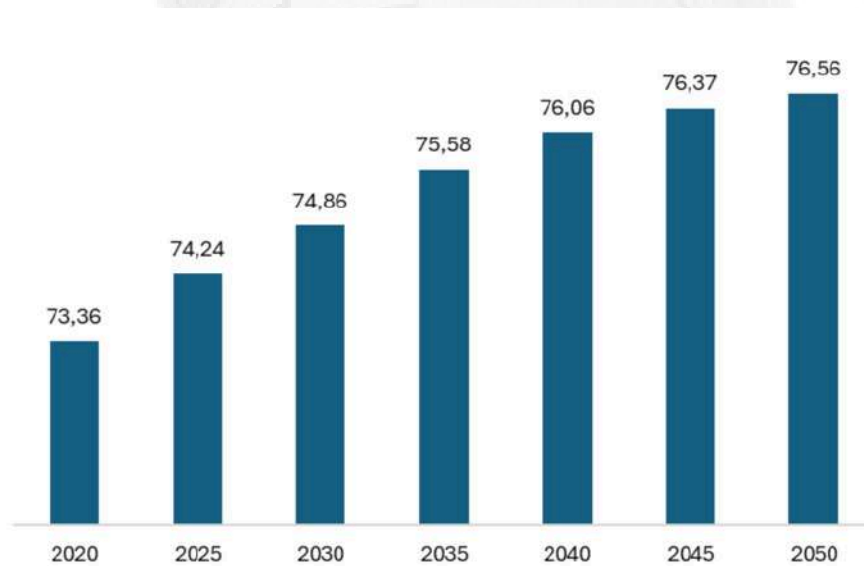


Gambar 7. Komposisi Usia Penduduk Tahun 2020-2050



Sumber: BPS 2008; 2013; 2023d (diolah penulis).

Gambar 8. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2020-2050



Sumber: BPS 2008; 2013; 2023d (diolah penulis).



Para ekonom berpendapat bahwa bonus demografi merupakan salah satu keuntungan ekonomis yang disebabkan penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil dari penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang. Tahun 2020 hingga 2035 diproyeksikan menjadi periode jendela peluang (*window of opportunity*) bagi Indonesia, di mana rasio ketergantungan berada pada tingkat terendah. Jika Indonesia berhasil menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) di tahun 2030 (Gambar 8), maka akan terjadi penurunan rasio ketergantungan. Sedangkan di tahun 2035 hingga 2040 diproyeksikan menjadi periode selesainya bonus demografi yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk lansia. Pada dasarnya, penduduk lansia mengalami penurunan kapasitas fisik serta peningkatan penyakit sehingga penduduk lansia menjadi tidak produktif dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau pemerintah. Di tahun 2035 diproyeksikan sebanyak 60% penduduk lansia merupakan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan di bawah SMP. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, sebelum periode bonus demografi usai, diperlukan upaya untuk menjaga agar lansia di Indonesia tetap aktif dan produktif agar tidak menjadi beban orang lain (Adioetomo & Pardede, 2018).



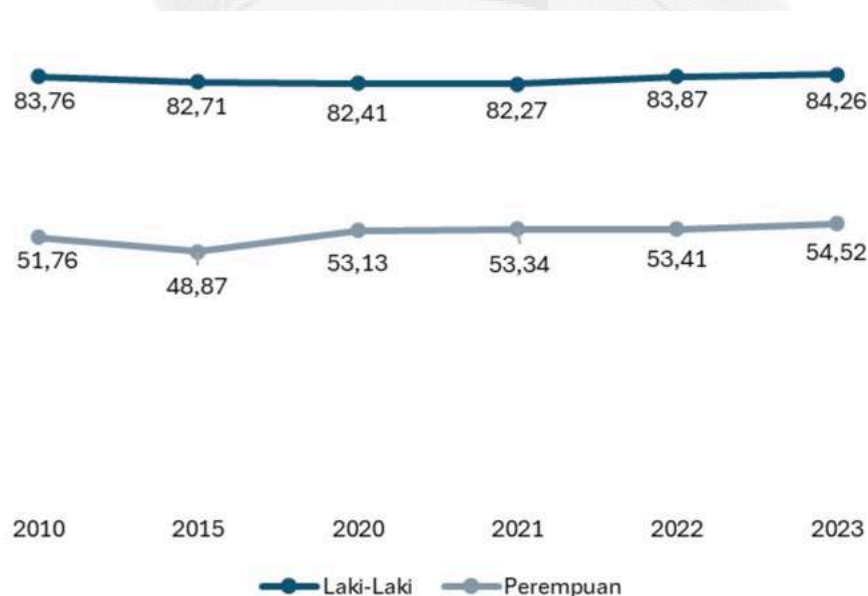
Capaian Momentum *Demographic Dividend* di Indonesia

Seperti dijelaskan sebelumnya, mekanisme untuk meraih *demographic dividend* dapat terjadi melalui 3 (tiga) mekanisme yaitu suplai tenaga kerja, modal manusia, dan akumulasi aset atau tabungan (Bloom et al., 2003). Bagian ini akan mengulas capaian Indonesia dalam ketiga mekanisme tersebut.

1. Aspek Ketenagakerjaan

Secara umum, suplai tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang ada. Gambar 9 menunjukkan TPAK di Indonesia menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki maupun perempuan secara umum mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Selain itu, TPAK perempuan masih jauh berada di bawah TPAK laki-laki. Dalam hal ini, selama lebih dari satu dekade terakhir, TPAK laki-laki masih berada pada kisaran 80%, sedangkan untuk perempuan berada pada kisaran 50% (lihat Gambar 9). Lebih lanjut, dilihat dari proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang berada di dalam angkatan kerja, Gambar 10 menunjukkan bahwa proporsi mereka yang bekerja lebih tinggi dibandingkan yang menganggur (diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT).

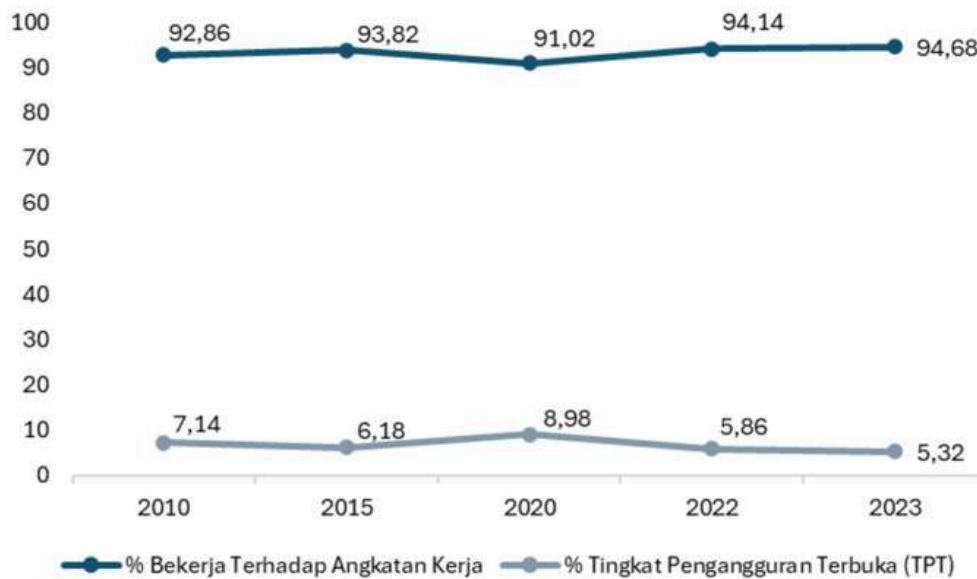
Gambar 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS 2011; 2015; 2020a; 2022a; 2023c (diolah penulis).



Gambar 10. Proporsi Penduduk Bekerja Terhadap Total Angkatan Kerja dan TPT

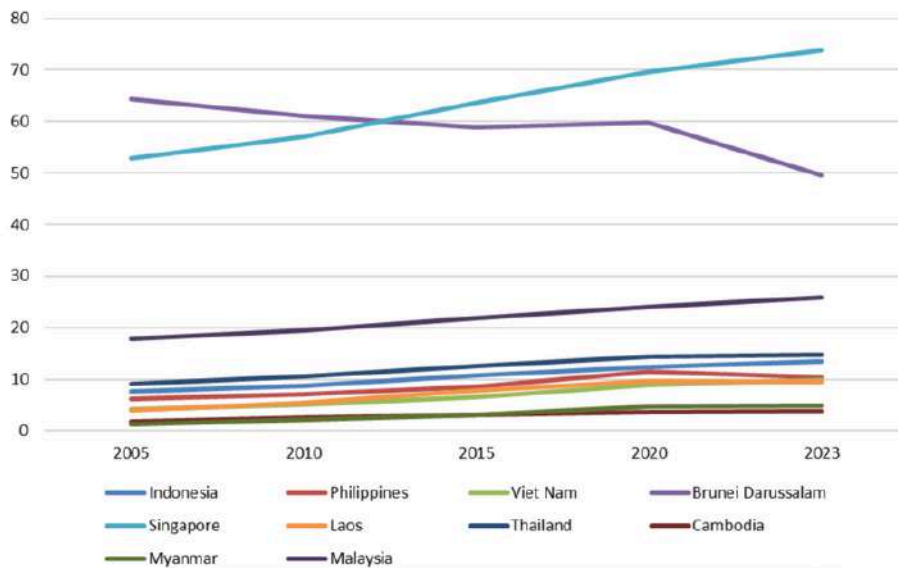


Sumber: BPS 2011; 2015; 2020a; 2022a; 2023c (diolah penulis).

Namun demikian, peningkatan suplai tenaga kerja saja belum tentu dapat meningkatkan produktivitas pekerja untuk dapat meraih bonus demografi tahap pertama. Seperti ditunjukkan pada Gambar 11a, produktivitas tenaga kerja Indonesia konsisten berada di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Dibandingkan dengan beberapa negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih kalah bersaing (Gambar 11b). Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah ini merupakan tantangan besar dalam meraih bonus demografi tahap pertama. Hal ini dikarenakan untuk dapat memasuki bonus demografi tahap kedua, diperlukan produktivitas yang tinggi dari penduduk usia kerja pada fase bonus demografi tahap pertama tersebut.

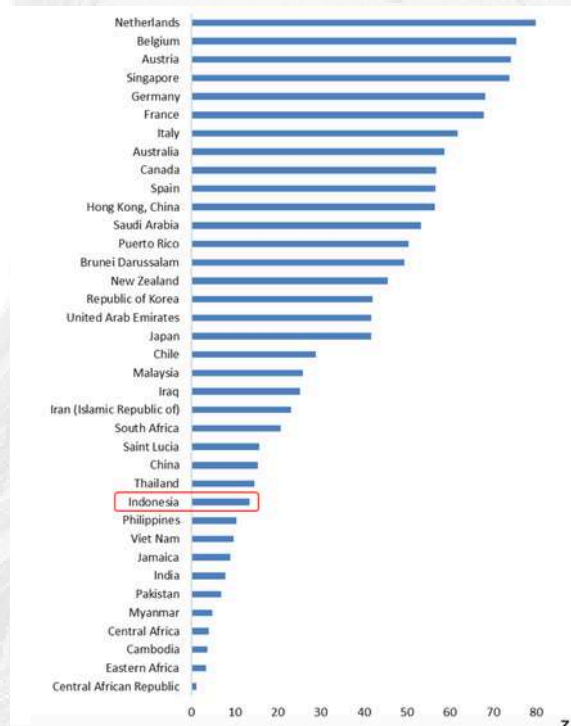


Gambar 11a. Produktivitas Tenaga Kerja di Beberapa Negara ASEAN (PDB atas dasar harga konstan 2017 USD PPP per jam kerja)



Sumber: ILOSTAT Data Explorer 2023 (diolah penulis).

Gambar 11b. Produktivitas Tenaga Kerja di Beberapa Negara (PDB atas dasar harga konstan 2017 USD PPP per jam kerja)

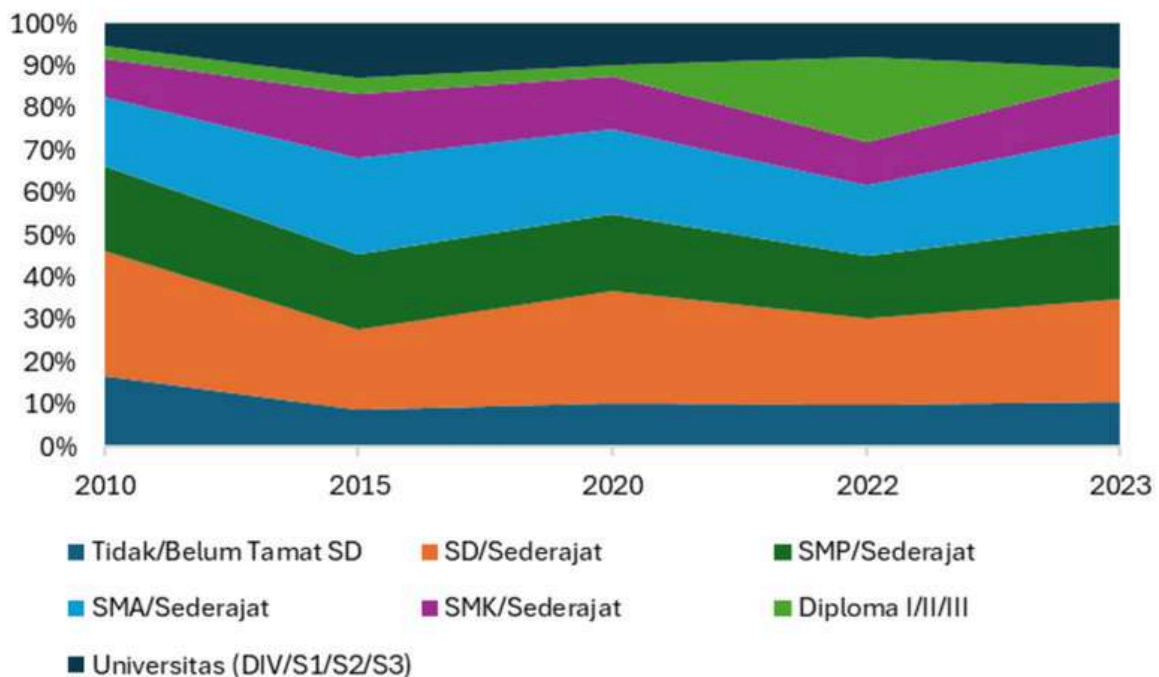


Sumber: ILOSTAT Data Explorer 2023 (diolah penulis).



Salah satu faktor penentu produktivitas pekerja adalah tingkat pendidikan pekerja. Pada Gambar 12 berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu mayoritas berpendidikan SMP sederajat atau lebih rendah. Selain itu, mayoritas pekerja di Indonesia bekerja sebagai pekerja informal (lihat Gambar 13). Hal ini dapat menjadi salah satu penjelasan rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia, karena pekerja informal cenderung hanya membutuhkan kualifikasi pendidikan yang relatif rendah dan memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah pula dibandingkan pekerja formal. Lebih lanjut, jika dilihat dari distribusi pendapatan pekerja (Gambar 14), mayoritas pendapatan pekerja berada pada desil 1 hingga 4, yang mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja memiliki pendapatan yang relatif rendah.

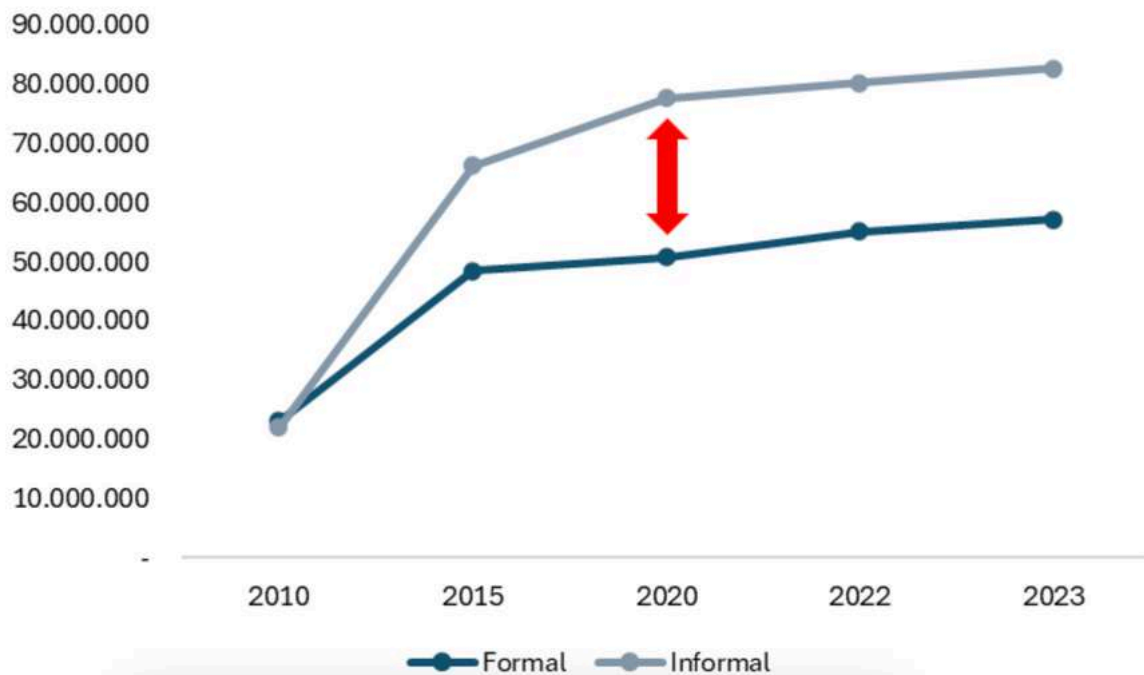
Gambar 12. Proporsi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS 2011; 2015; 2020a; 2022a; 2023c (diolah penulis).

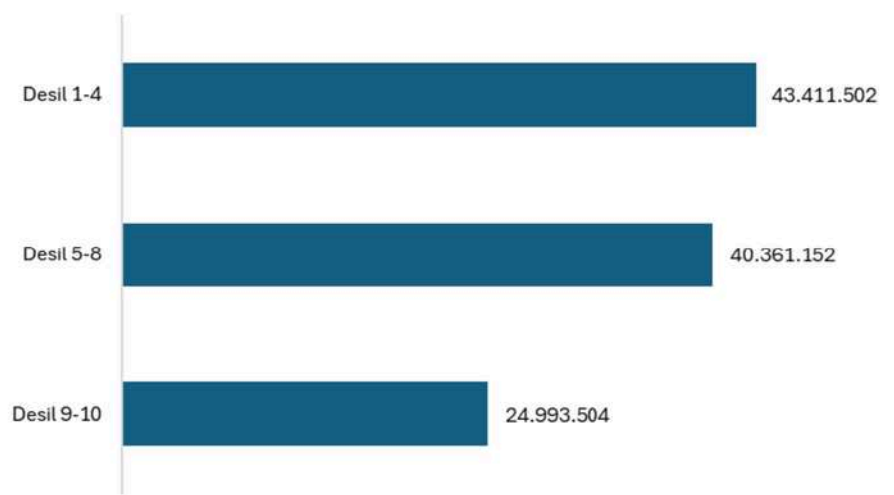


Gambar 13. Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Formal-Informal (Jiwa)



Sumber: BPS 2011; 2015; 2020a; 2022a; 2023c (diolah penulis).

Gambar 14. Jumlah Pekerja Berdasarkan Desil Distribusi Pendapatan Tahun 2022 (Jiwa)



Sumber: BPS 2022c (diolah penulis).

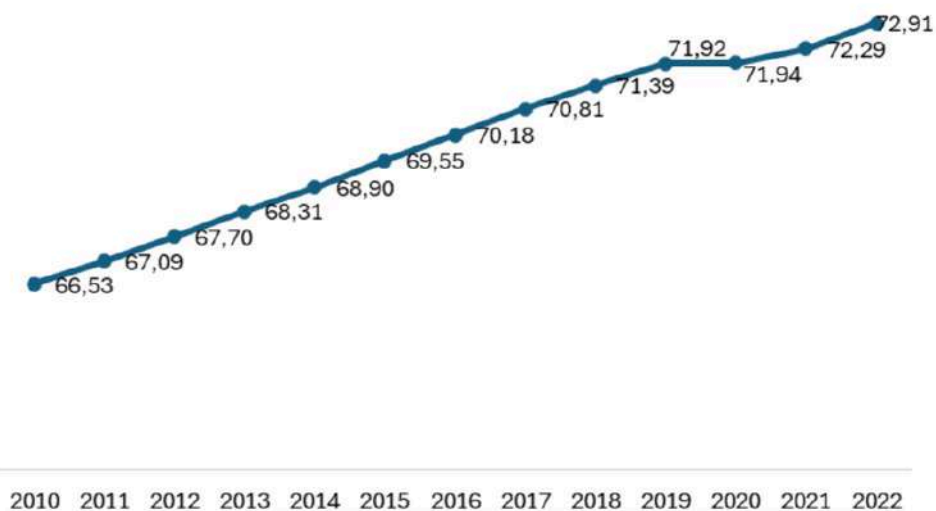


Adioetomo dan Pardede (2018) berpendapat bahwa dalam mencapai bonus demografi, penduduk usia kerja harus memiliki pekerjaan, penghasilan, dan tabungan serta tingkat partisipasi kerja perempuan yang tinggi (Adioetomo & Pardede, 2018, pp. 459). Dilihat dari data-data di atas, walaupun mayoritas penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) telah bekerja, namun sebagian besar hanya bekerja sebagai pekerja informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki tantangan pada peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.

2. Aspek Modal Manusia (*Human Capital*)

Mekanisme berikutnya adalah melalui investasi modal manusia. Indikator modal manusia yang utama adalah pendidikan dan kesehatan. Investasi modal manusia juga dapat dicerminkan dari indikator indeks pembangunan manusia atau IPM, yang dibangun dari indikator kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah, dan indikator kesejahteraan yaitu pengeluaran riil per kapita. Secara umum, IPM di Indonesia terus mengalami peningkatan (Gambar 15), yang mengindikasikan adanya perbaikan pada investasi modal manusia di Indonesia.

Gambar 15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010-2022



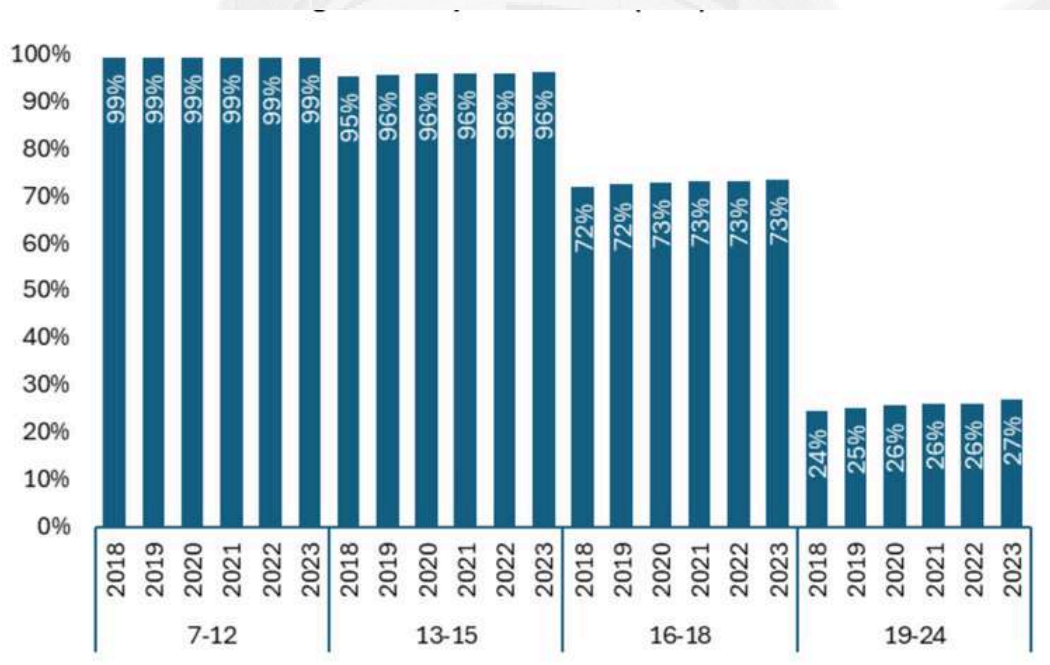
Sumber: BPS 2023c (diolah penulis).



Dilihat dari beberapa indikator pendidikan secara lebih rinci, Gambar 16-17 menunjukkan masih terdapat tantangan pencapaian Indonesia dalam investasi pendidikan. Secara khusus, berdasarkan data BPS tahun 2018-2023 tingginya angka partisipasi sekolah hanya terjadi pada kelompok usia 7-12 atau setara jenjang SD/Sederajat dan 13-15 tahun atau setara jenjang SMP/Sederajat. Sedangkan, hanya sekitar 73 dari 100 anak yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah dan hanya sekitar 25 dari 100 anak usia 19-24 tahun yang masih bersekolah di usia tersebut. Artinya, sebagian besar anak di Indonesia hanya memiliki pendidikan sampai jenjang SMP/Sederajat, dan hanya sebagian kecil anak yang memiliki tingkat pendidikan SMA atau lebih tinggi.

Selain itu, kualitas pendidikan Indonesia yang diukur dari nilai PISA untuk membaca, matematika, maupun ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa nilai PISA Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata 23 negara OECD lainnya (Gambar 17). Hal ini dapat mengindikasikan masih rendahnya investasi modal manusia dalam pendidikan di Indonesia dibandingkan negara-negara maju lainnya. Sementara itu, untuk mencapai bonus demografi tahap kedua, diperlukan upaya dalam membangun kualitas modal manusia sejak dini, termasuk peningkatan kapabilitas setiap individu agar dapat meningkatkan produktivitasnya.

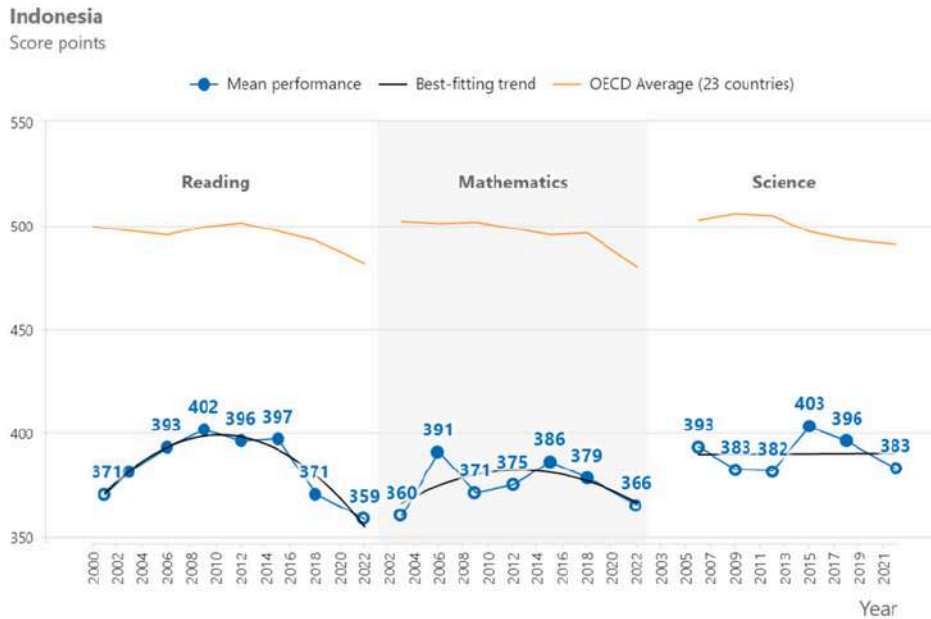
Gambar 16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018-2023



Sumber: BPS 2023a (diolah penulis).



Gambar 17. PISA Score Tahun 2022



Sumber: OECD Chart (2022).

Dari segi kesehatan, Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal kesehatan balita. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diperoleh gambaran bahwa Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada prevalensi *underweight* dan *wasting* balita. Sedangkan, prevalensi *stunting* sudah mengalami perbaikan walaupun masih menunjukkan angka di atas 20%. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada pencapaian pemanfaatan bonus demografi di Indonesia, dikarenakan peningkatan kualitas modal manusia salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan terkait kecukupan pangan dan gizi anak agar anak tidak rentan terhadap berbagai penyakit. Upaya ini memerlukan kebijakan yang dirancang sejak dini dimulai dari seribu hari pertama kehidupan dan perkembangan anak usia dini (Adioetomo & Pardede, 2018, pp. 34).

Gambar 18. Prevalensi *Stunting*, *Underweight*, *Wasting*, dan *Overweight* Balita (%)

	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI	
	2018	2019	2021	2022
Stunting	30,8	27,7	24,4	21,6
Underweight	17,7	16,3	17	17,1
Wasting	10,2	7,4	7,1	7,7
Overweight	8	4,5	3,8	3,5

Sumber: BRIN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (2023).

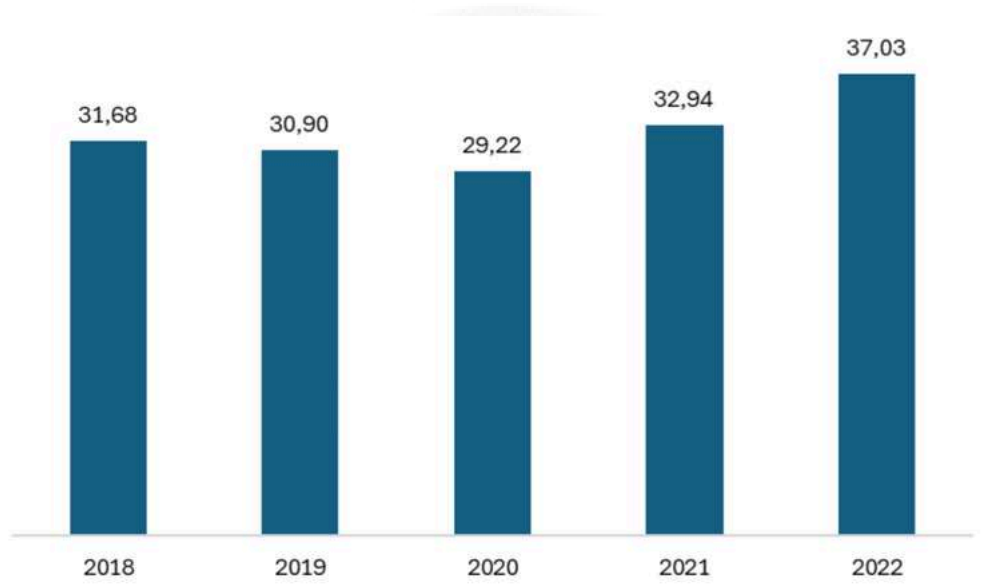


3. Aspek Aset dan Tabungan

Mekanisme terakhir adalah melalui kepemilikan aset atau tabungan yang diakumulasi oleh penduduk usia produktif ketika mereka bekerja dan menghasilkan pendapatan (pada tahap bonus demografi pertama), di mana aset atau tabungan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup di masa lansia atau pada masa saat tidak lagi bekerja.

Indikator tabungan secara makro yang dilihat dari proporsi gross savings terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia menunjukkan peningkatan walaupun masih berada di bawah 40% (Gambar 19). Selain itu, indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama hampir satu dekade terakhir (Gambar 20). Hal ini dapat menjadi indikasi meningkatnya literasi masyarakat akan sistem keuangan yang mampu membuat mereka lebih paham akan fungsi dan manfaat dari kepemilikan aset dan tabungan untuk masa depan.

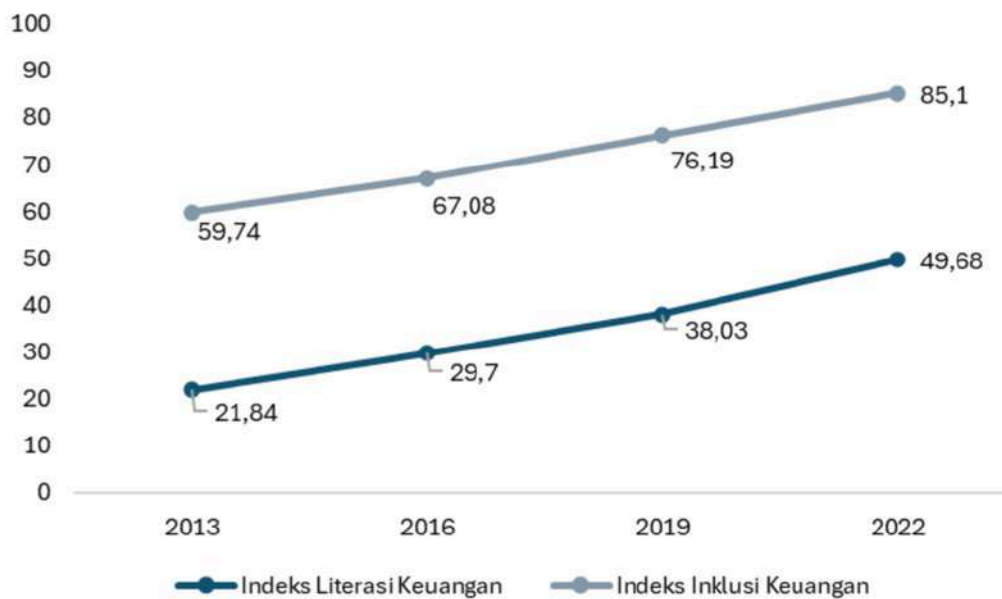
Gambar 19. Gross Savings (% PDB) Tahun 2018-2022



Sumber: *World Bank Open Data 2022a* (diolah penulis).



Gambar 20. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan (%)

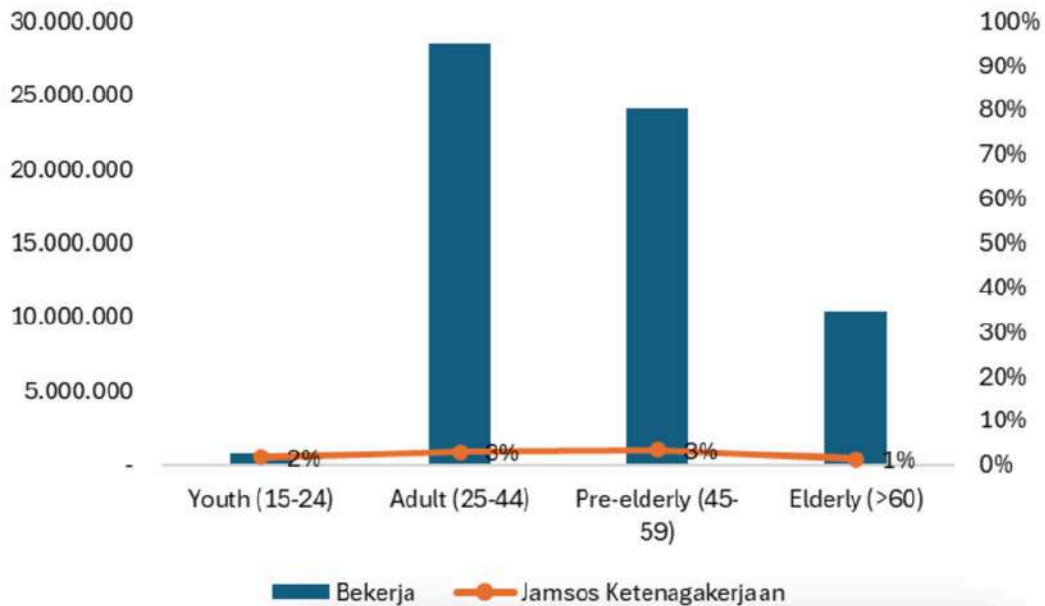


Sumber: *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022* (diolah penulis).

Namun demikian, tantangan masih terjadi jika dilihat dari kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker) bagi pekerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan hari tua dan jaminan pensiun, dapat menjadi tolak ukur kesiapan pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di masa tua dan masa pensiun. Namun, data yang ada menunjukkan bahwa dari total pekerja muda yang ada di Indonesia hanya sekitar 2% yang terlindungi oleh jamsosnaker, dan dari total pekerja dewasa hanya 3% yang terlindungi oleh jamsosnaker. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hanya 1% dari total pekerja lansia yang terlindungi oleh jamsosnaker. Hal ini dapat dijelaskan dari data status pekerjaan yang menunjukkan bahwa mayoritas pekerja Indonesia adalah pekerja informal (Gambar 13), di mana pekerja informal sebagian besar tidak atau belum terlindungi dari skema jamsosnaker.



Gambar 21. Jumlah Pekerja (Jiwa) dan Persentase Kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022

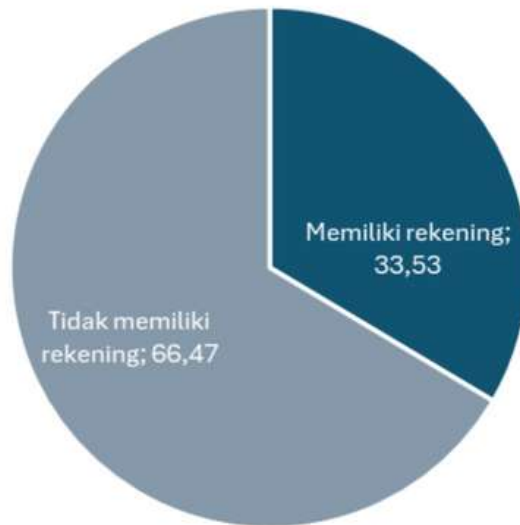


Sumber: BPS 2022c (diolah penulis).

Lebih lanjut, kondisi terkini lansia Indonesia berdasarkan data statistik lanjut usia menunjukkan bahwa sebagian besar lansia di Indonesia belum memiliki tabungan di hari tua. Data menunjukkan hanya sekitar 33,53% lansia di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa lansia Indonesia saat ini masih memiliki kerentanan yang tinggi karena sebagian besar belum memiliki kemampuan finansial untuk membiayai hidupnya sendiri. Sebagian besar lansia menggantungkan hidupnya pada anggota rumah tangga yang bekerja (Gambar 23). Hanya kurang dari 1% lansia yang memiliki sumber pembiayaan rumah tangganya dari investasi, sedangkan lansia yang memiliki sumber pembiayaan dari pensiunan hanya sekitar 5%-6%.

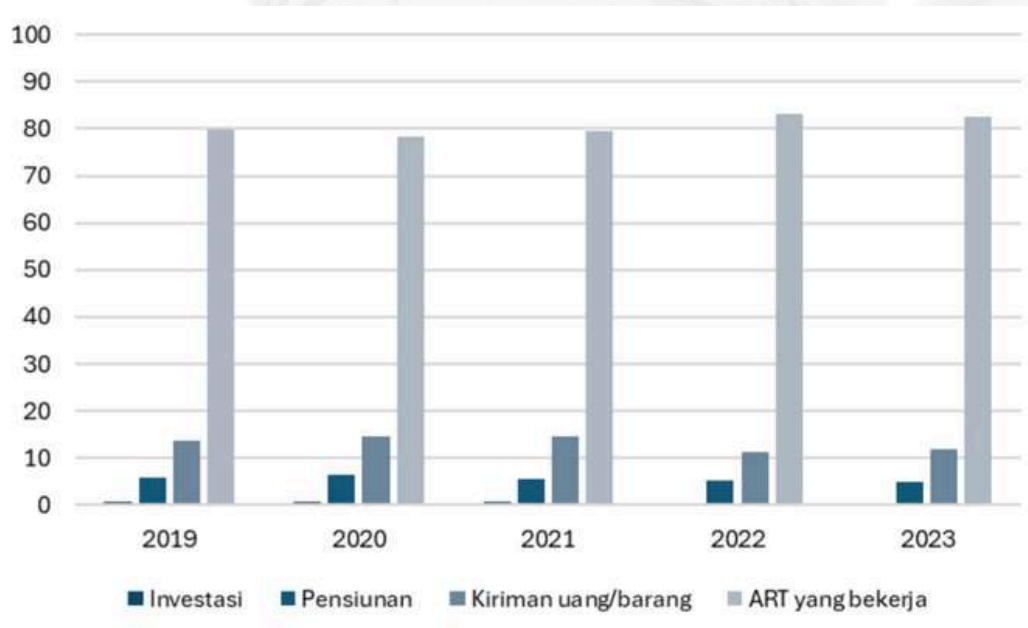


Gambar 22. Rumah Tangga Lansia Menurut Kepemilikan Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Tahun 2023 (%)



Sumber: BPS 2023e (diolah penulis).

Gambar 23. Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga (%)



Sumber: BPS 2019; 2020b; 2021; 2022b; 2023e (diolah penulis).



Hal ini patut menjadi perhatian, dikarenakan Indonesia akan segera memasuki era *ageing population*, namun kondisi lansia Indonesia saat ini masih minim akan perlindungan sosial ketenagakerjaan dan masih minim akan kepemilikan tabungan dan aset investasi. Sedangkan, untuk dapat meraih bonus demografi kedua, lansia diharapkan sudah memiliki aset maupun tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, lansia diharapkan dapat memasuki fase *ageing population* sebagai **lansia aktif (*active ageing*)** dan **lansia sukses (*successful ageing*)**, yaitu lansia yang tidak mudah terpapar penyakit (termasuk disabilitas), memiliki kemampuan kognitif dan kapasitas fungsional yang baik, serta dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal termasuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan kegiatan sipil kewarganegaraan (Adioetomo & Pardede, 2018, pp. 297-298).





Penutup

Indonesia saat ini tengah berada di antara akhir tahap ketiga dan memasuki tahap keempat dari model transisi demografi, yang ditunjukkan dengan mulai terjadinya perlambatan pada pertumbuhan penduduk serta tingkat kematian dan kelahiran yang rendah dan relatif stabil. Selain itu, transisi demografi yang dialami Indonesia telah mengubah struktur usia penduduk yang membawa Indonesia memasuki fase bonus demografi tahap pertama. Dalam hal ini, rasio ketergantungan di Indonesia sudah berada di bawah 50% sejak tahun 2015. Rasio ketergantungan di Indonesia diproyeksikan akan kembali meningkat setelah tahun 2035 dan kembali berada di atas 50% pada tahun 2045 dengan masuknya era *ageing population*.

Capaian Indonesia untuk dapat memetik bonus demografi atau *demographic dividend* sudah terlihat di beberapa aspek, khususnya pada peningkatan indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah, literasi dan inklusi keuangan, serta proporsi individu yang bekerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam meraih *demographic dividend* terutama masalah rendahnya produktivitas dan pendapatan tenaga kerja, kualitas pendidikan dari nilai PISA yang masih tertinggal, prevalensi gizi buruk balita yang masih relatif tinggi, rendahnya perlindungan jamsosnaker bagi pekerja, dan rendahnya proporsi lansia yang memiliki tabungan maupun aset. Hal ini tentunya patut menjadi prioritas pemangku kebijakan, mengingat kesempatan untuk memetik *demographic dividend* agar tidak berubah menjadi “bencana” atau *demographic burden*, khususnya pada fase *window of opportunity* yang diproyeksikan akan terjadi pada rentang tahun 2020–2035 untuk Indonesia, memiliki batasan waktu dan hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah bangsa Indonesia.



Referensi

- Adioetomo, S. M., & Pardede E. L. (2018). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini. Rajawali Pers.
- Birdsall, N., Kelley, A. C., & Sinding S. W. (2001). Population Matters: Demographic Change Economic Growth, and Poverty in the Developing World. Carnegie.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Rand.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2008). Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2011). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2010.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2015). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2020a). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2020b). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022a). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2022.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022b). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022c). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022 Agustus [database].
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023a). Angka partisipasi kasar (APK) menurut provinsi - tabel statistik. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAzlzl=/angka-partisipasi-kasar--apk--menurut-provinsi-dan-jenjang-pendidikan.html>
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023b). Indeks Pembangunan Manusia 2022.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023c). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023d). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023e). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023.
- BRIN - Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). BRIN - Badan Riset Dan Inovasi Nasional. <https://www.brin.go.id/news/116962/brin-ungkap-prevalensi-stunting-di-indonesia-cenderung-fluktuatif>
- Hayes, A., & Setyonaluri, D. (2015). Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: A Brief Introduction to Theory and Practice.
- ILOSTAT Data Explorer. (2023). https://rshiny.ilo.org/dataexplorer10/?lang=en&id=GDP_2HRW_NOC_NB_A
- Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. (2022). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>



- Kuznets, S. (1960). Population Change and Aggregate Output. <https://econpapers.repec.org/bookchap/nbrnberch/2392.htm>
- Laaser, U., & Beluli, F. (2015). South Eastern European Journal of Public Health.
- Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. <http://www.esp.org>
- Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2016). Demographic Dividends, Human Capital, and Saving. Journal of the Economics of Ageing. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.02.004>
- Misra, R. (2017). Impact of Demographic Dividend on Economic Growth: A Study of BRICS and the EU. International Studies. <https://doi.org/10.1177/0020881717714685>
- Nurarifin, & Ridena, S. (2020). The Role of ICT and Human Capital Development in Pursuing a Demographic Dividend and Improving Economic Welfare in Indonesia. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.19>
- OECD Chart. (2022). <https://oecdch.art/a4Ode1dbaf/C108>
- Olaniyan, O., Soyibo, A., & Lawanson, A. O. (2012). Demographic Transition, Demographic Dividend and Economic Growth in Nigeria. African Population Studies, 26. <http://aps.journals.ac.za>
- Population Reference Bureau. (2012). The Challenge of Attaining the Demographic Dividend. www.prb.org
- Renteria, E., Souto, G., Guevara, I. M., & Patxot, C. (2016). The Effect of Education on the Demographic Dividend. Population and Development Review, 42. <https://about.jstor.org/terms>
- Rostiana, E., & Rodesbi, A. (2020). Demographic Transition and Economic Growth in Indonesia. Jurnal Economia, 16. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>
- Satudata Kemnaker | portal data ketenagakerjaan RI. (n.d.). <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1146>
- Simon, J. (1981). The Ultimate Resource. Princeton University Press, Princeton.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Economic Development. Pearson.
- Van Der Gaag, N., & de Beer, J. (2014). From Demographic Dividend to Demographic Burden: The Impact of Population Ageing on Economic Growth in Europe. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie. <https://doi.org/10.1111/tesg.12104>
- World Bank Open Data. (2022a). World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?locations=ID>
- World Bank Open Data. (2022b). World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN>
- World Bank Open Data. (2022c). World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>